



**FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Kantor MPR/DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 22 Ruang 2208-2215  
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270  
Telp. (021) 575 5988, 575 5936, Fax. (021) 575 5925, 5755935



**PENDAPAT  
FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI  
TERHADAP  
TENTANG RUU TENTANG PEMILU DPR, DPD,  
DAN DPRD DAN RUU PEMILU PRESIDEN**

Disampaikan dalam Rapat Pansus

Tanggal : 12 Juli 2007

Juru Bicara : **H. RUSMAN HM. ALI, SH**

Nomor Anggota : A-295

**Yth, Saudara Pimpinan dan anggota Pansus**

**Yth, Saudara Mendagri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri  
Hukum dan HAM**

**Segecap hadirin yang tercinta**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

*Salam sejahtera bagi kita semua*

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kita bersama dapat menghadiri Rapat Pansus hari ini dalam rangka mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi di DPR terhadap RUU tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) dan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden) sebagai bagian dari penyempurnaan paket Undang-undang di bidang politik yang diajukan oleh Pemerintah.

Penyempurnaan atau revisi paket Undang-undang di bidang politik seakan mengokohkan tradisi yang berjalan selama ini, yakni melakukan

bongkar pasang peraturan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Kalau bukan merevisi undang-undang yang mengatur eksistensi parpol dan aturan main pemilu, peraturan pelaksanaannya yang diubah. Ini mengakibatkan pelaksanaan pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 hingga pemilu terakhir pada tahun 2004, berjalan dengan sistem, aturan, dan prosedur yang berbeda. Padahal jika ingin melihat hasil Pemilu yang baik haruslah didahului dengan konsistensi pada pelaksanaan sistem yang telah diatur oleh UU.

Merujuk pada naskah akademik yang menjadi acuan penyusunan RUU Pemilu Legislatif yang diajukan Pemerintah, revisi terhadap undang-undang tentang Pemilu kali ini diarahkan untuk menciptakan multi Partai sederhana dalam rangka memperkuat atau mengefektifkan sistem presidensial. Arahnya sudah jelas akan ada upaya penghambatan yang serius terhadap partai politik peserta Pemilu untuk mengiririnkan wakilnya dilegislatif dan eksekutif. Fraksi Partai Bintang Reformasi juga sangat memahami bahwa sistem pemerintahan presidensial kurang efektif jika di komparasikan dengan demokrasi multi partai yang sangat liberal. Akan tetapi hendaknya penyederhanaan itu hasil seleksi alamiah yang dilakukan oleh seluruh rakyat pada setiap penyelenggaraan Pemilu, bukan karena hasil rekayasa yang dipaksakan lewat aturan UU yang tidak adil dan punya kecenderungan membunuh demokrasi.

#### **Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus Yang Terhormat,**

Kami telah memahami dan melakukan kajian yang dalam terhadap draft RUU Pemilu Legislatif dan RUU Pemilu Presiden, khusus untuk draft RUU Pemilu Legislatif kami menilai bahwa sangat jelas bertendensi penyederhanaan partai yang dipaksakan. Klausul peningkatan syarat verifikasi Parpol sebagai peserta Pemilu Legislatif, peningkatan ambang batas perolehan kursi dari tiga persen (3%) menjadi lima persen (5%), dan perubahan daerah pemilihan khususnya untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah membuktikan bahwa penyederhanaan partai yang akan dicapai dengan proses pembunuhan melalui UU terhadap eksistensi partai menengah dan partai yang sedang berkembang. Pembunuhan itu semakin vulgar saja ketika draft yang sampai di DPR telah menghilangkan klausul yang mengatur Gabungan Partai Politik dimana diatur semacam koalisi yang lebih longgar antara partai politik agar dapat mengikuti pemilu dalam bentuk konfederasi yang tidak menghilangkan eksistensi masing-masing partai yang berkoalisi seperti praktek beberapa negara yang lebih mapan demokrasinya.

#### **Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus Yang Terhormat,**

CETRO sebagai lembaga masyarakat sipil yang selama ini konsen pada upaya pendemokratisasian sistem Pemilu telah melakukan simulasi, dimana jika model pembagian daerah pemilihan yang tertuang dalam RUU

Pemilu legislatif usulan pemerintah sekarang ini di praktekan maka khusus untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai yang mendapatkan kursi hanyalah Golkar dan PDIP serta PKB di Jawa Timur. Bukankah ini adalah proses amputasi terhadap eksistensi partai menengah dan yang baru berkembang seperti PBR di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga secara perlahan dan pasti partai-partai menengah dan yang sedang berkembang akan mati pada Pemilu selanjutnya. Dinegara seperti Inggris karena melihat begitu pentingnya daerah pemilihan yang rawan digunakan sebagai mekanisme pemberangusan terhadap keberadaan partai politik, maka dibentuk lembaga pendamping KPU yang terdiri dari berbagai unsur dan ahli dan bertugas khusus melakukan pembagian daerah pemilihan jauh sebelum Pemilu dilangsungkan.

### **Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus Yang Terhormat,**

Sistim Pemilu apapun semuanya baik dan mengandung segi kekurangan dan kelebihan masing-masing, tergantung cocok dan tidaknya sistem itu bagi kondisi masyarakat disuatu negara. Sehingga mari kita melihat dengan hati dan pikiran yang jujur sebagai negarawan yang menginginkan demokrasi kita tumbuh dengan baik tentang sistim pemilu yang bagaimana kita gunakan ditengah bangsa dan negara kita melaksanakan Reformasi dan sosiologi masyarakatnya yang majemuk dalam segala hal termasuk politik dan ideologi. Bukankah bangsa kita pernah melalui masa suram dalam kehidupan politik dimasa Orde Baru? dimana atas nama stabilitas partai politik diberangus dan hasilnya demokrasi terbunuh dan kita mengalami krisis multi dimensi sampai saat ini. Kenapa hal itu kembali akan kita ulangi dengan bentuk dan alasan yang tak serupa tapi esensinya sama yaitu atas nama efektifitas pemerintahan. Kami menolak sepenuhnya jika ada kalim yang mengatakan bahwa pemerintah tidak efektif karena partai yang banyak, atau mengatakan bahwa rakyat tidak menyukai banyak partai. Tidak ada fakta empiris membenarkan semua klaim diatas. Yang benar adalah rakyat mengeluhkan pemerintah yang tidak kunjung dapat memenuhi janji kampanyenya tentang kehidupan yang makin sejahtera, pemerintahan tidak efektif disebabkan oleh banyak faktor terutama birokrasi yang tidak direformasi dan pilihan kebijakan ekonomi yang masih konservatif ala pemerintahan lama yang kapitalistik. Disisi lain rakyat menyoroti secara tajam kinerja semua anggota DPR disemua level baik pusat maupun daerah yang berarti rakyat sesungguhnya menginginkan perbaikan kualitas partai politik, bukan mengeluhkan jumlah partai politik.

### **Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus Yang Terhormat,**

Fraksi Partai Bintang Reformasi berpandangan sebaiknya sistem Pemilu Legislatif yang telah digunakan seperti yang diatur dalam UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif sebaiknya di uji oleh lebih dari sekali Pemilu, kami

akan menyetujui proses revisi jika itu mengarah pada proses penyederhanaan partai yang lebih alamiah seperti perlu diaturnya kembali penggabungan Partai Poltik sebagai peserta Pemilu dalam bentuk konfederasi, sehingga berkesan tidak membunuh tapi justru mendewasakan partai politik untuk lebih rasional dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi. Dan sudah seharusnya menurut teori dan preseden bahwa partai Politik peserta pemilu yang telah lolos ambang batas berhak membentuk fraksi dan mengusulkan calon presiden. Kami berharap agar klausul yang mengatur pembagian daerah pemilihan, syarat verifikasi Partai Politik dalam kepesertaan Pemilu, ambang batas perolehan kursi dan penentuan calon yang terpilih masih menggunakan sistim sebagaimana yang telah digunakan pada pemilu 2004.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus Yang Terhormat,**

Demikianlah pendapat Fraksi Partai Bintang Reformasi. Semoga Allah SWT meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-NYA yang tiada terbatas.

*Billahit Taufik Walhidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI**

Jakarta, 12 Juli 2007

***Ketua***

***Sekretaris***

**Bursah Zarnubi, SE / A-292**

**dr. Diah Defawati Ande /A-298**

